

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sektor industri merupakan salah satu sektor ekonomi yang sedang dikembangkan di Indonesia sebagai sektor penggerak kemajuan sektor-sektor ekonomi lainnya. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian di jelaskan bahwa yang disebut industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga dapat menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk dengan jasa industri. Industri Kecil dan Menengah atau yang disingkat dengan IKM, tidak bisa dipungkiri merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di setiap wilayah di Indonesia. Peran penting IKM dalam hal ini, menyediakan lapangan kerja sehingga mampu mensejahterakan masyarakat di wilayah tersebut.

Industri kecil menengah sendiri diklasifikasikan menurut nilai investasinya. Menurut Macam-macam industri terbagi kedalam beberapa kategori berdasarkan nilai investasi sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 11/M – IND/PER/3/2014 yang di dalamnya dijelaskan mengenai kriteria industri kecil dan menengah dengan melihat nilai investasi untuk industri kecil paling banyak sampai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tetapi itu tidak termasuk tanah dengan perhitungan tanah dan bangunan tempat usaha yang dipakai. Sedangkan untuk industri

menengah paling sedikit yaitu Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) hingga mencapai yang paling banyak sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) itupun tidak termasuk tanah dan tempat usaha yang digunakan.

Dilihat dari Visi Pembangunan Nasional Jangka Panjang 2025 dan Tujuan 2020, telah disusun Kebijakan Pembangunan Industri Nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 28 Tahun 2008. Pelaksanaan otonomi daerah ditandai dengan disahkannya Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah dan direvisi menjadi Undang-undang No. 32 tahun 2004 telah memindahkan sebagian besar peran, tugas, tanggung jawab dan kewenangan pemerintahan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Oleh sebab itu pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk secara mandiri mengelola potensi sumber daya yang dimilikinya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Kabupaten Majalengka merupakan salah satu wilayah yang merencanakan industrialisasi pembangunan ekonomi daerah. Potensi-potensi yang ada saat ini terbagi menjadi beberapa Sektor yaitu Pertanian, Pertambangan dan Penggalan, Pengolahan, Listrik Gas dan Air Bersih, Kontruksi, Perdagangan Hotel dan Restoran, Pengangkutan dan Komunikasi, Keuangan Persewaan dan Jasa Perusahaan, dan terakhir yaitu Sektor Jasa-jasa.

Menurut BPS Kabupaten Majalengka laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Majalengka pada tahun 2021 sebesar 4,75%. Produk Domestik

Regional Bruto (PDRB) menjadi alat yang dapat digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dan fokus penelitian saat ini adalah sektor Industri Pengolahan. Dipilihnya sektor industri pengolahan sebagai salah satu sektor yang perlu dikembangkan, karena dari data PDRB Kabupaten Majalengka laju pertumbuhan sektor industri pengolahan cukup besar nilainya dari tahun pada 2021.

Adapun jenis-jenis usaha pada sektor industri kecil dan menengah yang termasuk dalam sektor industri pengolahan yaitu sebagai berikut.

Tabel 1. 1
Jumlah IKM Menurut Golongan Industri
Kabupaten Majalengka Tahun 2021

No	Klasifikasi Industri	Jumlah Usaha
1	Industri Makanan dan Minuman	774
2	Industri tembakau	16
3	Industri Pakaian Jadi	210
4	Instri Kulit Barang dari Kulit dan Alas Kaki	7
5	Industri Kayu Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang dari Anyaman Bambu Rotan dan sejenisnya	67
9	Industri Karet Barang dari Karet dan Plastik	1
10	Industri Barang Logam kecuali Mesin dan Peralatannya	66
12	Industri Furniture	91
13	Industri Barang Galian Bukan Logam	513
14	Industri Jasa dan Pengolahan Lainnya	24
15	Industri Tekstil	54
16	Industri Kertas dan Barang dari Kertas	2
17	Industri Mesin dan Perlengkapan ytd	1
Jumlah		1826

Sumber: Sentra Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Majalengka (diolah peneliti)

Bedasarkan tabel diatas, sektor industri barang galian bukan logam memiliki jumlah usaha yang cukup besar, yaitu sebesar 513 usaha. Industri barang galian bukan logam tersebut tersebar di Kabupaten Majalengka yang paling dominan yaitu industri pengolahan batu bata dan industri genteng.

Adapun perkembangan industri genteng di Kabupaten Majalengka dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. 2
Jumlah Industri Genteng berdasarkan beberapa Kecamatan
di Kabupaten Majalengka

Kecamatan	Jumlah Industri				
	2017	2018	2019	2020	2021
Cigasong	7	7	7	7	7
Dawuan	47	46	46	46	46
Jatiwangi	70	67	67	67	67
Kasokandel	30	23	27	23	23
Ligung	8	6	7	7	7
Maja	1	1	1	1	1
Palasah	6	1	1	1	1
Sukahaji	2	1	1	1	1
Jumlah	171	152	157	153	153

Sumber: Sentra Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Majalengka (diolah peneliti)

Berdasarkan data diatas dapat terlihat bahwa kecamatan yang paling banyak memiliki industri genteng yaitu Kecamatan Jatiwangi. Pada tahun 2017 jumlah industri genteng sebanyak 70 perusahaan, dan pada tahun 2018 hingga tahun 2021 sebanyak 67 perusahaan. Hal tersebut

berarti pengelolaan perusahaan genteng yang ada di Kecamatan Jatiwangi mengalami penurunan. Penurunan jumlah industri genteng di Kecamatan Jatiwangi disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya yaitu semakin sedikitnya bahan baku, berkurangnya tenaga kerja, dan alat-alat pengolahan yang sudah tidak bisa berfungsi secara optimal.

Hal tersebut sudah seharusnya menjadi perhatian Pemerintah Daerah untuk melakukan upaya terhadap salah satu industri tersebut. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri. Bahwa untuk menunjang pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi masyarakat dalam pembangunan industri serta memberdayakan budaya industri dan/atau kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat dilakukan melalui pengembangan industri kecil dan industri menengah oleh pemerintah daerah setempat. Implementasi pengembangan industri tersebut dengan dibuatnya program oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka.

Terkait pengembangan industri dan berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri di Kabupaten Majalengka maka Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka bekerja sama dengan stakeholder lain dalam merencanakan program pengembangan industri kecil menengah tersebut. Program tersebut mempunyai beberapa kegiatan yaitu pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Kegiatan tersebut dilakukan secara langsung oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian dengan dibantu oleh

Dinas lain serta beberapa komunitas yang peduli dengan pengembangan industri yang ada di Kabupaten Majalengka.

Namun peneliti memilih penelitian dengan berfokus pada salah satu industri genteng yang berada di Kecamatan Jatiwangi. Industri genteng Jatiwangi merupakan industri yang memiliki potensi untuk berkembang karena pasalnya genteng Kecamatan Jatiwangi sudah menjadi *icon* atau ciri khas dari Kabupaten Majalengka. Sebagian besar lahan yang dimiliki oleh masyarakat Kecamatan Jatiwangi dijadikan sebagai tempat pembuatan genteng dan tenaganya pun kebanyakan dari warga sekitar. Karena hal tersebut juga sudah menjadi usaha turun temurun hingga sekarang masih terjaga tetapi sudah sangat menurun dan juga banyak yang gulung tikar.

Implementasi pengembangan industri kecil dan menengah yang dilakukan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka mengalami beberapa permasalahan. Berdasarkan pengamatan awal peneliti pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka dan beberapa industri genteng Kecamatan Jatiwangi, program pengembangan belum terlaksana secara optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari salah satu dimensi yaitu evaluasi masukan pada model Evaluasi Program oleh Stufflebeam yang dikemukakan dalam buku (Arikunto & Jabar, 2018).

Peneliti melakukan pengamatan pada beberapa industri genteng yang ada di Kecamatan Jatiwangi dan menemukan beberapa berita mengenai perkembangan industri tersebut, peneliti menemukan beberapa

permasalahan. Dalam evaluasi konteks terdapat indikator dukungan lingkungan yang berarti kemampuan lingkungan eksternal maupun internal untuk mendukung suatu kegiatan tersebut. Pada program pengembangan IKM ini, terlihat masih belum optimalnya dukungan lingkungan yaitu kurangnya partisipasi para pengusaha industri ataupun tenaga kerjanya untuk mengikuti program pengembangan tersebut.

Selain evaluasi konteks, evaluasi proses terdapat indikator sarana dan prasarana yang berarti diperlukan untuk mempermudah proses pengembangan dalam program tersebut. Sarana dan prasarana dalam program pengembangan IKM berupa fasilitas produksi seperti alat dan bahan baku penunjang kegiatan industri genteng masih belum terpenuhi.

Kedua permasalahan dari indikator-indikator diatas belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, dinyatakan bahwa pemberian fasilitas yang diberikan kepada industri kecil dan menengah seharusnya berupa segala sesuatu yang menunjang kegiatan industri termasuk bantuan bahan baku dan bahan penolong, bantuan mesin, juga bimbingan teknis untuk melakukan pembinaan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian diatas peneliti menduga bahwa evaluasi pelaksanaan program belum optimal hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator dimensi model yang dapat dikatakan masih terdapat permasalahan.

Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai evaluasi program pengembangan industri oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka dengan judul **"EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL MENENGAH OLEH DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN MAJALENGKA"**.

1.2 Identifikasi Masalah

Merujuk pada latar belakang belakang yang telah peneliti paparkan diatas, maka permasalahan yang telah peneliti identifikasi ialah sebagai berikut:

1. Kurangnya dukungan lingkungan yang berupa partisipasi masyarakat yang menjadi pengusaha ataupun tenaga kerja pada industri genteng pada terhadap program pengembangan IKM tersebut.
2. Masih kurangnya perhatian pemerintah dalam memberikan fasilitas berupa sarana dan prsarana untuk menunjang kegiatan industri genteng di Kecamatan Jatiwangi.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka terdapat beberapa rumusan permasalahan yang bisa ditarik kesimpulannya dan dapat di tuangkan secara detail kedalam pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana evaluasi konteks dalam program pengembangan IKM pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka?

2. Bagaimana evaluasi masukan dalam program pengembangan IKM pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka?
3. Bagaimana evaluasi proses dalam program pengembangan IKM pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka?
4. Bagaimana evaluasi produk dalam program pengembangan IKM pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang peneliti susun diatas, maka penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui:

1. Mengetahui evaluasi konteks dalam program pengembangan IKM pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka.
2. Mengetahui evaluasi masukan dalam program pengembangan IKM pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka.
3. Mengetahui proses manfaat dalam program pengembangan IKM pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka.
4. Mengetahui evaluasi produk dalam program pengembangan IKM pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun beberapa kegunaan dari dilakukannya penelitian ini ialah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna menjadi salah satu sumber untuk memperluas pengetahuan serta wawasan yang dimiliki peneliti mengenai Ilmu Administrasi Publik khususnya mengenai evaluasi pada

suatu program atau kebijakan pada organisasi publik, salah satunya ialah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu pertimbangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka terutama pihak SIKIM dalam mengoptimalkan evaluasi program sehingga apa yang menjadi tujuan instansi dapat dicapai, selain itupun besar harapan peneliti bahwasanya hasil penelitian ini bisa dijadikan referensi penelitian selanjutnya yang memiliki kesamaan dengan objek penelitian.

1.6 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menggunakan METODOLOGI konsep kerangka pemikiran dengan konsep segitiga terbalik yaitu dari teori umum ke khusus yang diawali dengan Administrasi Publik sebagai *Grand Theory*, kemudian Kebijakan Publik sebagai *Middle Range Theory*, dan terakhir adalah Evaluasi Program sebagai *Operational Theory*.

Administrasi Publik menurut Nigro (1970) merupakan sebuah proses kerjasama yang ada pada lingkungan pemerintahan yang meliputi tiga elemen yaitu Lembaga Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif (Mindarti, 2016). Dari proses Kerjasama tersebut melahirkan suatu produk yaitu kebijakan publik. Adapun pendapat dari Chandler dan Plano (1988) yang dikutip dari (Revida et al., 2020) mengemukakan bahwa administrasi publik merupakan sebuah proses mengorganisir dan mengkoordinasikan

sumber daya serta personel yang tujuannya untuk mengimplementasikan, mengelola, serta memformulasikan keputusan atau kebijakan publik.

Kemudian kebijakan publik itu sendiri merupakan segala keputusan dari pemerintah. Hal tersebut juga dikemukakan oleh Thomas R. Dye (1972) menyatakan bahwa kebijakan publik sebagai “*whatever government choose to do or not to do*” yang berarti segala keputusan bagi pemerintah untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukannya sama sekali (Maksum, 2020). Adapun pendapat yang dikemukakan oleh Michael Hill (1993) dalam buku yang berjudul “Kebijakan Publik” (Sore & Sobirin, 2017) bahwa kebijakan publik diartikan sebagai sebuah keputusan yang didasarkan pada keterkaitan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para pelaku politik atau pemerintah untuk menentukan tujuan agar mendapat hasil yang diharapkan berdasarkan pertimbangan tertentu. Kebijakan publik dianggap sebagai strategi bagi permasalahan yang berkembang di masyarakat.

Operational Theory, Program Evaluation yaitu sebuah proses yang di dalamnya berupa kegiatan-kegiatan penilaian atau perbandingan suatu objek evaluasi yaitu program. Program sendiri disini merupakan kegiatan yang dapat mengimplementasikan sebuah kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah. Evaluasi tersebut bermanfaat dalam suatu kajian kebijakan publik, sebab dengan adanya proses evaluasi akan dapat terlihat seberapa efektif dan efisien terlaksananya suatu program pemerintah.

Adapun penjelasan menurut (Wirawan, 2016) menjelaskan bahwa evaluasi merupakan sebuah proses mengumpulkan, menganalisis, serta menyajikan berbagai informasi tentang objek evaluasi, dari informasi tersebut selanjutnya akan dianalisis dan dinilai sesuai dengan indikator atau standar penilaian yang ada. Hasil dari analisis tersebut nantinya akan digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh pihak-pihak terkait mengenai objek evaluasi.

Salah satu model evaluasi program yang dikembangkan oleh Daniel L. Stufflebeam yaitu model CIPP. Model ini singkatan dari huruf pertama dari empat kata, yaitu *Context, Input, Process, and Product*. Keempat kata tersebut merupakan sasaran evaluasi, yang tidak lain merupakan komponen dari proses program kegiatan. Dengan kata lain, model CIPP merupakan model evaluasi yang menganggap program yang dievaluasi sebagai suatu sistem (Stufflebeam, 2000).

Menurut teori Stufflebeam (2000) dalam buku (Arikunto & Jabar, 2018) terdapat empat tahapan evaluasi yang komprehensif atau menyeluruh yaitu:

1. Evaluasi Konteks (*Context Evaluation*)

Evaluasi konteks adalah gambaran secara detail mengenai latar belakang yang mempengaruhi tujuan yang akan dicapai dalam suatu program. Indikator dari evaluasi konteks ini terdiri dari (1) legalitas program, (2) dukungan lingkungan dan (3) tujuan program.

2. Evaluasi Masukan (*Input Evaluation*)

Evaluasi masukan memberikan informasi mengenai aspek sarana prasarana yang menjadi faktor pendukung dalam pencapaian tujuan program yang ditentukan. Selain itu, dapat membantu dalam pengambilan keputusan serta memilih sumber-sumber yang ada. Dalam hal ini yang menjadi indikator evaluasi masukan yaitu: (1) sumber daya manusia, (2) program kegiatan, (3) sarana dan prasarana, (4) anggaran dana, (5) peraturan dan prosedur yang diperlukan.

3. Evaluasi Proses (*Process Evaluation*)

Evaluasi proses yaitu memberikan informasi dalam pelaksanaan peninjauan mengenai langkah atau metode yang dipilih di lapangan, dan menilai sejauh mana rencana yang telah ditentukan sebelumnya apakah telah dilaksanakan dengan baik dan apakah sudah relevan dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang menjadi indikator dalam evaluasi proses ini yaitu: (1) pelaksanaan program, (2) pengelolaan program, (3) faktor penghambat dan pendukung yang terjadi dalam pelaksanaan program.

4. Evaluasi Produk/Hasil (*Product Evaluation*)

Evaluasi produk memberikan informasi untuk memutuskan dan menilai sejauh mana tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dapat tercapai atau belum dan apakah metode yang telah diambil dan diimplementasikan untuk mencapai tujuan tersebut harus diperbaiki,

dilanjutkan atau bahkan dihentikan. Indikator evaluasi produk ini yaitu: (1) pencapaian program (2) dampak program.

